E. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Arus Kas
Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode yang disajikan:

Keterangan	31 Desember (dalam Rp miliar)		
	2015	2014	2013
Kas Bersih diperoleh (digunakan) untuk dari			
Aktivitas Operasional	(167,07)	245,53	1.435,00
Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi	(626,08)	(2.405,77)	(3.762,40)
Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	9.918,23	663,93	2.580,65
Peningkatan/(penurunan) bersih kas dan setara kas	3.125,10	(1.496,31)	253,25
Kas dan setara kas, saldo awal	2.820,50	4.297,17	3.956,33
Selish Kurs Mata Uang Asing	163,64	19,64	87,59
Kas dan setara kas, saldo akhir	6.109,24	2.820,50	4.297,17

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasional - dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2015, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp167,07 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang menghasilkan arus kas diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp245,53 miliar, terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp7.028 miliar dibandingkan tahun sebelumnya Rp5.887,00 miliar terutama karena peningkatan penerimaan yang melanda di sektor real estate, rumah, dan apartemen serta kenaikan pendapatan sewa dari mal dan mal outlet jasa manajemen, pembayaran untuk pembelian tanah yang akan dikembangkan sebesar Rp2.229,77 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.268,83 miliar, serta pembayaran pajak final sebesar Rp333,38 miliar dibandingkan tahun sebelumnya Rp297,19 miliar.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2014, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp245,53 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.435,00 miliar, terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp5.887,00 miliar dibandingkan tahun sebelumnya Rp2.707,67 miliar terutama karena pada tahun 2013 terdapat penerimaan dari penjualan kavling tanah di Bukit Kapalita PT Bumi Parama Wisesa, PT Indonesia International Exat dan PT BSNL Indonesia, pembayaran untuk pembelian tanah sebesar Rp1.268,83 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.321,96 miliar, serta pembayaran pajak final sebesar Rp297,19 miliar dibandingkan tahun sebelumnya Rp341,46 miliar.

Penerimaan yang digunakan untuk Aktivitas Investasi

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2015, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp626,08 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.405,77 miliar, terutama terdiri dari penerimaan bunga sebesar Rp322,15 miliar dibandingkan tahun sebelumnya Rp269,04 miliar, penerimaan dividen Rp119,00 miliar dibandingkan tahun sebelumnya Rp65,82 miliar, penerimaan uang muka atas penjualan investasi dalam saham Rp224,54 miliar dibandingkan tahun sebelumnya Rp239,34 miliar karena adanya akuisisi saham PLN di tahun 2014 dan perolehan properti investasi sebesar Rp628,58 miliar dibandingkan tahun sebelumnya Rp168,58 miliar terutama disebabkan oleh pembayaran properti investasi dalam pengembangan antara lain C-biq, GOPN, dan Courts.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2014, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp2.405,77 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.762,40 miliar, terutama terdiri dari penerimaan bunga sebesar Rp269,04 miliar dibandingkan tahun sebelumnya Rp195,94 miliar, penerimaan dividen Rp65,82 miliar dibandingkan tahun sebelumnya Rp35,72 miliar, penempatan investasi Rp128,15 miliar dibandingkan tahun sebelumnya Rp47,69 miliar, pembelian piutang piutang beresal non usaha sebesar Rp129,36 miliar dibandingkan tahun sebelumnya tidak ada, penambahan aset tetap Rp159,38 miliar dibandingkan tahun sebelumnya Rp73,54 miliar, pembayaran investasi dalam saham Rp2.394,34 miliar dibandingkan tahun sebelumnya Rp1.655,43 miliar karena adanya akuisisi saham PLN dan perolehan properti investasi sebesar Rp168,58 miliar dibandingkan tahun sebelumnya Rp1.303,42 miliar, pencarian investasi Mudharabah sebesar Rp351,66 miliar dibandingkan tahun sebelumnya penempatan investasi mudharabah sebesar Rp255,00 miliar, arus kas bersih atas pelepasan saham sebesar Rp127,35 miliar dibandingkan tahun sebelumnya Rp100,00 miliar, arus kas keluar bersih atas akuisisi entitas anak sebesar Rp241,80 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp255,95 miliar.

Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2015, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp9.918,23 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp663,93 miliar, terutama terdiri dari penerimaan utang obligasi sebesar Rp2.967,16 miliar dibandingkan nihil di tahun sebelumnya karena adanya penerbitan *Senior Notes* GPC, penerimaan utang bank jangka pendek sebesar Rp607,00 miliar dibandingkan tahun sebelumnya Rp390 miliar karena adanya pembayaran utang bank jangka pendek sebesar Rp130,00 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp300,00 miliar.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2014, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp663,93 miliar, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.580,65 miliar terdiri dari penerimaan utang obligasi yang nihil dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.750,00 miliar, penerimaan utang bank jangka pendek sebesar Rp390,00 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp47,69 miliar, pembelian piutang piutang beresal non usaha sebesar Rp300,00 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp91,00 miliar, dan pembayaran bunga sebesar Rp373,32 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp166,11 miliar.

Aktivitas dan Solvabilitas

Tingkat aktif mencerminkan kemampuan Perseroan dalam mempergunakan aktivity secara efektif dan efisien untuk menghasilkan pendapatan yang diukur dengan perbandingan antara pendapatan usaha dengan total aset. Pada tahun 2015, 2014, dan 2013 tingkat aktivitas Perseroan masing-masing adalah sebesar 0,17x, 0,19x, dan 0,25x.

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitasnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan dua metode sebagai berikut:

- Liabilitas dibagi Ekuitas (Perbandingan Utang terhadap Ekuitas); dan
- Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset).

Rasio utang terhadap ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir tahun 2015, 2014, dan 2013 masing-masing adalah sebesar 41%, 28%, dan 40%. Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir tahun 2015, 2014, dan 2013 masing-masing adalah sebesar 21%, 2%, dan 19%.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ROE*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 2015, 2014, dan 2013 masing-masing adalah sebesar 10,62%, 21,49%, dan 22,17%.

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari setiap rupiah aset yang dimiliki. ROA Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 2015, 2014, dan 2013 masing-masing adalah sebesar 6,51%, 14,05%, dan 13,18%.

Sensitivitas terhadap Mata Uang Asing

Sebagian besar transaksi Perseroan dilakukan dalam mata uang Rupiah. Perseroan dan Entitas Anak hanya memiliki exposure yang terpengaruh risiko nilai tukar dalam jumlah minimal. Exposure akan timbul apabila transaksi dilakukan dalam berbagai mata uang asing bukan untuk memenuhi kebutuhan mata uang operasional unit-unit operasional Perseroan dan Entitas Anak atau transaksi kepada pihak ketiga.

F. PEMBELANJAAAN MODAL

Pembelanaan modal terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembelian aset tetap, properti investasi, dan pengembangan. Sumber dana yang digunakan untuk pembelian modal tersebut berasal dari Ekuitas BSD di tahun 2015 dan arus kas dari operasi Perseroan. Tabel berikut ini menggambarkan pembelian modal Perseroan yang terjadi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014, dan 2013:

Keterangan	Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember (dalam Rp miliar)		
	2015	2014	2013
Tanah	40,90	13,98	761,00
Bangunan	16,16	16,16	515,51
Sarana pelengkap bangunan	0,81	0,5	0,05
Peralatan kantor	175,53	72,15	6,18
Peralatan proyek	0,53	0,66	0,23
Mesin - mesin	1,17	0,62	0,29
Kendaraan	24,35	15,94	20,35
Saldo dalam penyelesaian	621,93	306,23	102,22
Total	959,38	427,11	1.405,83

Untuk membiayai pembelian modal, Perseroan tidak melakukan pinjaman nilai atas transaksi tersebut karena sebagian besar transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah. Untuk meminimalisir timbulnya masalah di masa yang akan datang terhadap pembelian modal tersebut yang sesuai dengan tujuannya, maka Perseroan telah memilih dan menerapkan kebijakan atas setiap pembelian modal tersebut dengan menggunakan modal sendiri.

Perseroan membuat studi kelayakan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan segala aspek antara lain aspek keuangan dan bisnis. Perseroan berkeinginan dengan melakukan pembelian barang modal akan mendukung kegiatan usaha Perseroan secara berkelanjutan.

G. PENGINGKAPAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF TENTANG RISIKO PASAR

Perseroan menghadapi risiko pasar dari kegiatan usaha yang dilakukan. Risiko pasar ini berhubungan dengan perubahan di tingkat suku bunga, aset komoditas, nilai tukar mata uang asing, dan inflasi yang dapat mempengaruhi nilai dari harga komoditas dan liabilitas atau arus kas dan pendapatan Perseroan di masa depan. Perseroan juga menghadapi risiko kredit dalam bentuk penurunan atau kegagalan dalam pembayaran dari para konsumen Perseroan. Pada umumnya, Perseroan memelihara harga komoditas yang dapat diantisipasi dalam penentuan harga penjualan produk-produknya. Karena konsumen Perseroan yang beragam dan banyak, maka risiko kredit Perseroan tersebut secara merata.

Perseroan mengawasi selanjutnya dari pelanggan untuk memastikan bahwa tidak terdapat tunggakan. Selain itu, Perseroan juga telah mengasuransikan aset dan proyek-proyek yang sedang dibangun. Informasi selanjutnya mengenai polis asuransi Perseroan dapat dilihat pada Bab VII Prospektus Awal mengenai Keterangan Tentang Perseroan dan Anak Perusahaan. Perseroan menyiapkan rencana anggaran dan strategi Perseroan yang dapat membuat kerangka tata kelola perusahaan yang meliputi Komite Audit dan Divisi Audit Internal.

H. MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan usahanya Perseroan dan Anak Perusahaan ("Grup BSD") menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Grup BSD apabila tidak diantisipasi dan dipertanggungjawabkan penanganannya yang meliputi risiko pasar, risiko investasi, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko operasional, dan harus melalui penilaian sendiri mengenai kelayakan investasi tersebut. Di bawah ini adalah paparan Perseroan mengenai risiko yang material yang diketahui Perseroan saat ini, berdasarkan bobot yang bersifat paling berat hingga paling kecil, yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan Grup BSD untuk menghasilkan laba.

- Risiko Suku Bunga
- Untuk mitigasi dan meminimalkan risiko suku bunga, Perseroan mengelola beban bunga melalui kombinasi utang dengan suku bunga tetap dan suku bunga variabel, dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Manajemen juga melakukan penelaahan terhadap suku bunga yang ditawarkan kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perjanjian utang.
- Risiko Nilai Tukar

Perseroan tidak memiliki exposure yang terpengaruh risiko nilai tukar. Exposure akan timbul apabila transaksi dilakukan dalam berbagai mata uang asing dibandingkan jika menggunakan mata uang fungsional untuk operasional Perseroan atau transaksi kepada pihak ketiga.

Transaksi umum yang dilakukan Perseroan (seperti: penjualan, pembelian, dan beban usaha) sebagian besar menggunakan mata uang Rupiah. Untuk mitigasi risiko ini, manajemen melakukan review berkala atas exposure mata uang asing.

- Risiko Kredit

Untuk Perseroan untuk mitigasi risiko ini yaitu dengan cara melakukan evaluasi atas kondisi keuangan pelanggan dalam hal kegiatan tabung pelanggan kepada Perseroan. Berdasarkan evaluasi tersebut pihak Manajemen Perseroan akan menentukan perjanjian jumlah yang tidak dapat ditagih atas aset keuangan tersebut.

- Risiko Likuiditas

Dalam pengelolaan dan mitigasi risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan untuk mengatasi kebutuhan likuiditas. Untuk menjaga kondisi likuiditas, manajemen berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

RISIKO USAHA

A. Risiko usaha yang berkaitan dengan Perseroan dan Entitas Anak

- Risiko berkurangnya cadangan lahan Grup BSD dan kepemilikan lahan Perseroan di area BSD City.
- Peningkatan suku bunga atau penurunan kecenderungan pendanaan kredit perumahan akan mempengaruhi kegiatan usaha Grup BSD.
- Grup BSD mungkin dihadapkan dengan risiko kredit macet.
- Kegiatan usaha Grup BSD dapat dipengaruhi oleh kenaikan harga, keterlambatan, dan keterbatasan atau gangguan dalam pasokan bahan bangunan dan persediaan dengan tenaga kerja.
- Grup BSD menggunakan kontrak pihak ketiga untuk pengembangan properti hunian, dan untuk pengembangan properti komersial.
- Grup BSD bersaing dengan sejumlah perusahaan pengembangan real estate lainnya.
- Grup BSD mungkin tidak dapat mengidentifikasi atau memperbaiki cacat atau penyimpangan dalam hak atas tanah atau tanah yang direncanakan untuk pengembangan.
- Grup BSD mungkin dihadapkan dengan tuntutan pemerintah sehubungan dengan pengembangan tanah, peraturan lingkungan dan undang-undang lain yang berlaku dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap peraturan tersebut dapat mempengaruhi proyek pengembangan.
- Kebertahanan Grup BSD tergantung pada kemampuannya untuk mengantisipasi dan merespon keluhan konsumen terkait dengan proyek-proyeknya.
- Grup BSD telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir dan terbuka kemungkinan untuk tidak dapat mempertahankan pertumbuhan tersebut, sehingga hasil usaha akan terpengaruh.
- Bisnis Grup BSD dan prospek pertumbuhan di masa mendatang mengharuskan Grup BSD untuk meningkatkan penyerapan modal investasi, yang mungkin tidak tersedia secara memuaskan atau bahkan sama sekali tidak tersedia.
- Grup BSD mengukui pendapatan dari penjualan bangunan bertingkat berdasarkan metode persentase penyelesaian akuntansi, yang dapat mengakibatkan fluktuasi pendapatan dan biaya pengembangan dari periode ke periode.
- Perseroan bergantung kepada manajemen senior, direksi dan personel kunci dalam sebagai besar keberhasilannya.
- Terdapat kemungkinan bahwa asuransi Grup BSD tidak memberikan perlindungan yang cukup memadai terhadap asetnya.
- Apabila karyawan Perseroan memperoleh persediaan, terdapat kemungkinan Perseroan akan terkena dampak dari pemisahan insidental, penurunan tingkat produktivitas dan kenaikan biaya yang signifikan.
- Perseroan dan/atau Anak Perusahaan terlibat dalam proses hukum dan proses-proses tertentu lainnya di Indonesia dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap bisnis Perseroan.
- Kinerja dan usaha Grup BSD sangat tergantung pada iklim industri real estate Indonesia.
- Risiko yang berkaitan dengan Perusahaan Induk.

Perseroan memiliki penyerahan saham di beberapa perusahaan baik langsung maupun tidak langsung, yang kinerja keuangannya dikonsolidasikan pada laporan keuangan Perseroan. Dengan demikian, kinerja keuangan konsolidasi tidak terlepas dari kinerja Anak Perusahaan yang dimilikinya. Dalam hal ini, Perseroan menghadapi risiko sebagai perusahaan induk yang pendapatannya dipengaruhi oleh kontribusi dari para Anak Perusahaan. Apabila kegiatan usaha dan pendapatan dan/atau kinerja Anak Perusahaan menurun, maka hal ini dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan secara konsolidasi.

B. Risiko yang berkaitan dengan Perusahaan Induk

Perseroan memiliki penyerahan saham di beberapa perusahaan baik langsung maupun tidak langsung, yang kinerja keuangannya dikonsolidasikan pada laporan keuangan Perseroan. Dengan demikian, kinerja keuangan konsolidasi tidak terlepas dari kinerja Anak Perusahaan yang dimilikinya. Dalam hal ini, Perseroan menghadapi risiko sebagai perusahaan induk yang pendapatannya dipengaruhi oleh kontribusi dari para Anak Perusahaan. Apabila kegiatan usaha dan pendapatan dan/atau kinerja Anak Perusahaan menurun, maka hal ini dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan secara konsolidasi.

Anak Perusahaan Perseroan memiliki kegiatan usaha yang sama dengan Perseroan dan kondisi keuangan Perseroan akan terpengaruh oleh perkembangan risiko-risiko usaha di atas.

C. Risiko Investasi bagi Investor Pemegang Obligasi

- Risiko tidak adanya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tuntutan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta tungguk pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk melakukan pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari berkurangnya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 29 April 2016 atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny (an *Independent Member of Moore Stephens International Limited*) yang berkedudukan di Singapura dan Kantor Akuntan Publik di Indonesia dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus Awal.

KETERANGAN TENTANG PERSEORAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEORAN

Perseroan pertama kali didirikan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumi Serpong Damai No.50, tanggal 16 Januari 1984 sebagaimana diubah melalui Akta Perubahan No.149 tanggal 27 Oktober 1984 dan Akta Perubahan No.82, tanggal 23 April 1985, sehingga disetujui dan disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 25 September 1985 serta telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No.CS.2710.HT.01.10.Th.85, tanggal 10 September 1985 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 10 September 1985 dan telah didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.67, tanggal 22 Agustus 1986, Tambahan No.1016. Pemegang Saham tidak langsung Perseroan, yaitu PT Sinar Mas Tunggal, Sinarmas Land Ltd. (merupakan perusahaan tercatat di SGX-ST) dan PT Sinarmas Geringgangan merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki kegiatan usaha di bidang produksi kertas, makanan, properti, agribisnis, dan jasa keuangan.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami tiga kali perubahan sejak Penawaran Umum Berkelanjutan I, yaitu:

- Akta Perubahan Keputusan Rapat No. 30, tanggal 29 April 2014, dibuat di hadapan Syarifuddin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, dimana berdasarkan akta ini telah disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula 17.496.996.592 saham atau sebesar Rp1.749.699.659.200 menjadi 18.371.846.392 saham atau sebesar Rp1.824.699.619.200 yang diambil bagian oleh PT Paraga Artamida dan PT Ekaentara Usaha Maju masing-masing sebanyak 437.424.900 saham (dengan nilai nominal Rp1,00 per saham) sehingga Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan diubah. Akta ini telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 13 Mei 2014, dan telah didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.103 tanggal 13 Mei 2014, ditandatangani dan ditandatangani dalam Berita Negara Republik Indonesia No.103 tanggal 13 Mei 2014, ditandatangani dan ditandatangani dalam Berita Negara Republik Indonesia No.103 tanggal 13 Mei 2014.
- Akta Perubahan Keputusan Rapat No. 01, tanggal 2 April 2015, dibuat di hadapan Syarifuddin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, dimana berdasarkan akta ini telah disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula 18.371.846.392 saham atau sebesar Rp1.837.184.639.200 menjadi 19.246.696.192 saham atau sebesar Rp1.924.699.619.200 yang diambil bagian oleh PT Paraga Artamida dan PT Ekaentara Usaha Maju masing-masing sebanyak 437.424.900 saham (dengan nilai nominal Rp1,00 per saham) sehingga Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan diubah. Akta ini telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 13 Mei 2015, dan telah didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.103 tanggal 13 Mei 2015, ditandatangani dan ditandatangani dalam Berita Negara Republik Indonesia No.103 tanggal 13 Mei 2015.
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 06, tanggal 6 Mei 2015, dibuat oleh Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat, dimana berdasarkan akta ini telah disetujui (i) penyisihan Pasal 11 tentang Penentuan RUPS, Pasal 14 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 13 tentang Pengawasan RUPS, Pasal 13 tentang Pimpinan dan Berita Acara RUPS, dan Pasal 14 tentang Kuorum, Hak Suara, dan Pemilihan RUPS menjadi Pasal 11 sampai dengan Pasal 47 sebagai hasil penyisihan dan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (ii) penyisihan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (iii) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (iv) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (v) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (vi) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (vii) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (viii) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (ix) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (x) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xi) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xii) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xiii) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xiv) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xv) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xvi) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xvii) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xviii) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xix) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xx) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xxi) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xxii) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xxiii) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xxiv) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xxv) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xxvi) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xxvii) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xxviii) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xxix) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xxx) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xxxi) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xxxii) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xxxiii) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xxxiv) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xxxv) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xxxvi) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xxxvii) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xxxviii) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xxxix) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xl) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xli) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xlii) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xliiii) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xliv) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xlv) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xlvi) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xlvii) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xlviii) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xlviii) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xlviii) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xlviii) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xlviii) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32 (xlviii) perubahan Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyisihan dengan ketentuan Peraturan O